

kesalahan prosedur sebagai unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam arti pidana.

B. Saran

1. Dalam setiap perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keputusan bisnis direksi BUMN seharusnya penyidik memerhatikan ketentuan *business judgment rule* agar dapat menentukan upaya hukum apa yang tepat atas keputusannya yang merugikan perseroan apakah masuk dalam lingkup perdata atau pidana sehingga setiap direksi BUMN dapat di proses secara adil.
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum publik dan privat utamanya menyangkut keuangan negara dan keuangan perseroan. Peningkatan dan penguatan kualitas aparat penegak hukum melalui seminar atau pelatihan. Perlu ditambahkan ketentuan doktrin *business judgment rule* secara teknis pada peraturan Menteri BUMN tentang tata Kelola perusahaan yang baik agar pertanggungjawaban dan perlindungan direksi BUMN menjadi seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2009.

Aminuddin Ilmar, *Privatisasi BUMN di Indonesia*, Hasanuddin University, Makassar, 2004.

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Arifin Soeria Atmadja, *“Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,

Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule*, Gramedia, Jakarta, 2018.

Bismar Nasution, *“Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan”*, Kencana, Jakarta, 2013.

Chaeruddin, *Strategi Pencegahan Hukum dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Fred. B.G. Tumbuan, *Himpunan Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.

- Hasbullah F. Sjawid, *Direksi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta: 2015.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta, Yogyakarta, 2014
- Muhammad Djafar saidi dan Eka Merdekawati, *Hukum Keuangan Negara teori dan praktik*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2012.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, , 2010,
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Mukti Media, Depok, 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Valerine, J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Yahya Harahap, *Hukum Peseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

JURNAL/ARTIKEL :

Andrew Keay and Joan Loughrey, *The Concept of Business Judgment*, Journal Of Legal Studies, 2019.

Arifin Soeria Atmadja, *Aspek Hukum Keuangan Negara Pada Perseroan Terbatas yang Sahamnya Antara Lain Dimiliki Oleh Negara*, Makalah dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 27 Juni 2002.

Bernard S. Sharfman, *'The Importance of the Business Judgment Rule'*, New York University Journal of Law and Business, 2017.

Desak Nyoman Alit Gunatri, Ida Ayu Sukihana, (2019) "Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge Terhadap Direksi Perseroan", *Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 3, Juli 2019

Dwi ananda Fajar Wati, *Pertanggungjawaba Hukum Terhadap Kerugian Negara Pada BUMN Persero*, Badamai Law Journal, Vol.1, Issues 1, April 2016.

Muhammad Zainul Arifin, Firman Muntaqo, (2018), "Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BumN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”, *Jurnal Nurani*, Vol.18, No.2, Desember 2018.

Ridwan Khairandy, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, Jurnal Hukum No. 1, Vol. 16, 2009.

Shinta Ikayani Kusumawardani, *Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*, Jurnal Hukum Vol.2, 2012.

Shinta Agustina, S.H., M.H., *et al.*, *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Artikel Puslitbang Mahkamah Agung RI Vol.I, 2016.

Yafet Yosafet Wilben Risy, *Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule Di Amerika, Australia Dan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020,

WEBSITE :

<https://enacademic.com/>

<https://majalah-prosekutor.com>

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi